BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN NEOLIBERAL DAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

A. Sejarah Masuk dan Perkembangan Neoliberal di Indonesia

Awal Kapitalisme di Indonesia bisa dibilang sudah terjadi sejak lama, yaitu sejak VOC atau *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* sebuah perusaahan dagang asal belanda mulai melakukan ekspansi monopoli sumber daya alam hampir di semua wilayah bumi nusantara ini sejak abad 17. Pada saat itu VOC diperkuat dengan modal dan armada beserta prajurit militernya. Dengan perdagangan paksa dan monopolistik akhirnya tidak sampai satu abad VOC telah menjadi korporasi raksasa pertama di dunia.

Pada 1799 VOC dinyatakan bangkrut. Akhirnya kerajaan Belanda mengambil alih segala asset VOC, dan membentuk pemerintahan Hindia Belanda di nusantara. Wilayah yang telah dikuasai VOC kemudian bahkan diperluas (sejak 1817) dan dikelola secara lebih baik bagi sumber surplus ekonomi Belanda. Sejak abad 19 itu pula, perekonomian nusantara semakin banyak mengalami diversifikasi dan semakin terkait dengan pasaran internasional (tidak hanya bertumpu kepada komoditi rempah-rempah saja). Sebagai contoh, pemerintah Hindia Belanda menjalankan system *Cultuurstelsel* (tanam paksa) di banyak wilayah, terutama di pulau Jawa. Istilah *Cultuurstelsel* itu sendiri sebenarnya hanya berarti "system

pembudidayaan", namun dikenal luas sebagai tanam paksa oleh sejarawan dan bangsa Indonesia karena sifat memaksa dan eksploitatifnya.[30]

Selanjutnya ketika Indonesia merdeka pada 17 agustus 1945, pemerintahan pada saat itu masih disibukkan dalam pembenahan pemerintahn pasca kemerdekaan dan sibuk mempertahankan kemerdekaan dari kaum kolonial yang ingin kembali menjajah.

Akan tetapi Meskipun dominasi kapitalisme atas Indonesia di era 1945-1965 tidak terlihat langsung, sebenarnya dinamika perekonomian Indonesia masih cukup kuat dipengaruhinya. Struktur ekonomi dan mekanisme perekonomian yang diwariskan VOC dan pemerintah Kolonial Belanda tidak serta merta punah dengan kepergiaannya secara fisik. Jangan dilupakan bahwa perdagangan internasional masih terus berlangsung pada saat itu, dan sebagian besar pertambangan tetap berproduksi (meskipun dengan kondisi berfluktuatif)[31].

Pada pemerintahan selanjutnya mulai dari Pemeritahan Soeharto, BJ Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono perkembangan neoliberalisme di Indonesia semakin sempurna. Setalah ini akan penulis jelaskan secara satu bersatu era pemerintahan beserta kebijakan yang penulis yakini adalah produk pengaruh dari neoliberalisme.

---

[30] Rizky dan Nasyith Majidi., *NEOLIBERALISME MENCENGKERAM INDONESIA*, Jakarta, 2008. Hal 276-277

[31] Ibid., hal. 278

1. Pemerintahan Soeharto

Pada Pemerintahan Soeharto jelas perubahan ekonomi berubah secara besar-besaran. Setelah sebelumnya Presiden Soekarno yang terkenal idealis dan menerapkan system perekonomian yang anti kendali asing. Sejak runtuhnya orde lama dan berganti menjadi orde baru yang dikomandoi oleh Presiden Soeharto Industri pertambangan menjadi contoh paling tepat bagaimana ide-ide neo-liberal mulai diperkenalkan sejak awal orde baru. UU No.1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing menjadi titik masuk investasi asing di sektor ini. Pasal 8 UU No. 1/1967 menyebutkan "Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku". Kebijakan lebih rinci yang mendorong investasi di sektor ini adalah UU No.11/ 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Indonesia memperkenalkan Kontrak Karya (KK), model kontrak antara pemerintah dan perusahaan asing, yang dianggap paling liberal dalam dunia industri pertambangan. Kebijakan-kebijakan ini benar-benar merupakan cermin dari apa yang oleh Emel dan Huber (2008) menyebutnya sebagai mantra 'neo-liberal risk' di sektor pertambangan. Mantra ini menganggap perusahaan swasta menghadapi risiko politik, komersial, dan geologi yang besar dan tidak sepadan dengan pemilik tanah dan mineral (negara) di mana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memperoleh jaminan pemerintah bahwa tidak ada nasionalisasi dan aneka klaim hak milik

(*multiple property claims*), ancaman terorisme dan sabotase, pembatalan kontrak, dan aturan perpajakan, eksplorasi dan eksploitasi yang kaku. Tujuannya adalah akumulasi kapital dapat berlangsung tanpa gangguan.

Freeport yang pertama kali memperoleh KK April 1967 benar-benar memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah. Draft KK itu bukan dibuat oleh pemerintah Indonesia, tetapi sepenuhnya disiapkan sendiri oleh Freeport untuk kemudian disetujui. Moh. Sadli, salah seorang teknokrat yang diasosiasikan dengan 'Mafia Berkeley' mengatakan bahwa KK Freeport saat itu adalah bagian dari cara pemerintah untuk menarik investasi asing. Fakta lain, pemberian kontrak itu terjadi ketika status politik Papua masih belum jelas: apakah memilih bergabung dengan Indonesia atau mau merdeka melalui sebuah referendum, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang akan dilakukan pada tahun 1969. Dan seperti kita ketahui, ternyata referendum dilakukan bukan berdasarkan prinsip 'satu orang satu suara,' sesuai ketentuan PBB, tetapi dilakukan oleh hanya 1.024 orang, yang berada di bawah pengawasan tentara. Pemerintah menganggap kendala fisik dan penduduk Papua yang primitif menjadi faktor penghalang untuk sebuah referendum yang melibatkan hampir 1 juta penduduk Papua saat itu. Tidak heran, di

bawah akal-akalan pemerintah ini, hasil referendum menyatakan Papua bergabung dengan Indonesia.[32]

Di bawah perlakuan yang istimewa terhadap Freeport (*subsidiary of Freeport Sulphur Co, USA*), investasi swasta asing berlomba-lomba masuk Indonesia. Setelah Freeport Indonesia memperoleh kontrak karya (KK) tahun 1967, maka hingga 1970 tercatat 9 perusahaan asing mengantongi KK dengan pemerintah Indonesia, dua di antaranya PT. Freeport dan PT. Inco. Dalam perkembangannya, Indonesia menjadi lahan subur bagi investasi asing, dan sebelum kejatuhan Suharto, dianggap sebagai negeri yang paling menarik dari sisi investasi pertambangan di Asia (Leith, 2000). Nilai investasi KK, 1968 – 1990, mencapai USD 2,339 juta; tahun 1994 USD 861 juta dan; tahun 1997, USD 1, 922 juta. Pemain-pemain utama dalam industri pertambangan dunia hadir di Indonesia, seperti Rio Tinto, Newmont Gold Company, Newcrest Mining Ltd, Broken Hill Proprietary Company Ltd, Freeport McMoran Copper & Gold Inc, dan Inco Ltd. Tentu saja, itu semua berkat keuntungan yang melimpah ruah di bawah jaminan politik yang kuat.

[32] Roshid, Rum. *Perkembangan Pendidikan Indonesia dalam Lingkaran Neoliberalisme.* http://www.scribd.com/doc/37902966/an-Pendidikan-Di-Indonesia-Dalam-Lingkaran-Neoliberalisme

2. Pemerintahan Habibie

Semenjak pengunduran diri Presiden Soeharto karena terjadi demo besar-bearan di Jakarta kala itu membuat BJ Habibie yang kala itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden secara otomatis menjadi Presiden menggantikan Presiden sebelumnya Soeharto. Semasa menjabat menjadi Presiden Habibie menerbitkan UU No.10/1998 tentang Perbankan. Setelah merevisi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan menggantinya dengan UU No.10/1998. Ini merupakan salah satu resep IMF yaitu liberalisasi perbankan yang diyakini bisa menyehatkan perekonomian yang kala itu sedang terpuruk dengan nilai mata uang Indonesia mencapai 16.000 rupiah per dollar AS.

Dengan aturan di atas, pihak asing bisa memiliki hingga 99% saham bank di Indonesia. ini jauh lebih tinggi dari komitmen Indonesia di WTO yang pada awalnya adalah 49%, lalu dinaikkan menjadi 51%. Indonesia bahkan lebih liberal dari Negara-negara Amerika Serikat, Australia, Kanada Singapura dan sebagainya yang menerapkan pembatasan kepemilikan asing dalam sector perbankannya. Juga paling "ngawur" di antara Negara-negara Asia lainnya. Sebagai dampak dari UU Perbankan yang sangat liberal ini, saat ini 6 dari 10 bank terbesar di Indonesia sudah memiliki pihak asing dengan kepemilikan mayoritas. Hebatnya lagi, pihak asing bisa membeli bank-bank tersebut dengan hanya 8-12% dari total biaya rekapitulasi dan restukturisasi perbankan yang dikeluarkan oleh Negara. Negara pun masih harus membayar bunga

obligasi sekitar Rp 50-60 triliun setiap tahun hingga 2030. kenyataan ini merupakan sebuah demonstrasi kebodohan yang rada memuncak dan sulit di cerna dengan akal sehat. Selanjutnya, saat ini semakin banyak bank-bank kecil yang diakuisi oleh pihak asing. Bukan itu saja, serbuan banker asing ke Indonesia pun sudah pada tingkat yang memprihatinkan, tanpa ada regulasi yang mencegahnya. Padahal, yang dating ke Indonesia adalah banker asing "kelas rendah", yang tidak jarang kalah mampu dibandingkan dengan bankir Indonesia.[33]

Perlu dicatat pelaksanaan agenda-agenda neoliberal secara massif berlangsung setelah Indonesia mengalami krisis pada tahun 1997. Di motori oleh IMF, yang berisi paket kebijakan ekonomi Konsensus Washington. Pada pemerintahan BJ Habibie yang terbilang cukup singkat agenda neoliberal hanya sedikit sekali terealisasi. Pada saat itu Presiden BJ Habibie mau tidak mau harus melakukannya karena desakan dari dalam dan luar negeri apalagi kala itu masih banyak terdapat kroni-kroni Soeharto di masa pemerintahannya.

3. Pemerintahan Megawati

Pemerintah dibawah Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitakan UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu pilar agenda neoliberal dalam globalisasi ekonomi adalah Privatisasi BUMN. Kebijakan inilah yang dalam SAP dalam paket

[33] Amin Rais, Mohammad. *Selamatkan Indonesia.* Yogyakarta : PPSK Press : 2008. hal 185

kebijakan Konsensus Washington atau "IMF *Preconditions*" disebut sebagai Privatisasi. Kebijakan ini selanjutnya berdampak pada di privatisasinya aset-aset strategis negara seperti Telkom, Indosat, PT BNI, PT Batu Bara Bukit Asam. Inilah salah satu keberhasilan IMF untuk mendikte Indonesia melalui tim ekonomi yang berhaluan "*Mafia Berkeley*", yang berpaham neoliberalisme.

Berbagai saham BUMN strategis "berhasil" dijual diera Megawati. Sebut saja penjualan saham Perusahaan Gas Negara sebesar Rp 7,34 triliun melampaui dari target semula yaitu Rp 6,5 triliun. Privatisasi Bank Mandiri dengan nilai Rp 2,5 triliun, PT Indosat Rp1,16 triliun dan Bank Rakyat Indonesia Rp 2,5 triliun.

Namun, ada satu rencana terbesar di era Pemerintah Megawati dalam privatisasi BUMN yakni pada tahun 2004. Wakil pemerintah yakni Laksamana Sukardi dan Boediono pada tahun Maret/April 2004 mengajukan privatisasi 28 BUMN. BUMN itu terdiri dari 19 BUMN dan 9 non-BUMN atau BUMN minoritas. Privatisasi 28 BUMN tersebut merupakan gabungan dari program carry over kelanjutan privatisasi BUMN tahun 2002 dan tahun 2003 serta program murni privatisasi BUMN tahun 2004. Dan untungnya,sebagian besar program privatisasi yang diajukan pemerintah via Laksamana Sukardi dan Boedino ini kandas ditangan DPR karena alasan politik Pemilu 2004.

Sejumlah BUMN yang masuk dalam daftar privatisasi tersebut adalah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT

Danareksa, PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk, PT Batubara Bukit Asam Tbk, PT Merpati Nusantara Airlines, dan PT Perkebunan Nusantara III, PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Cambrics Primissima, dan BUMN sektor kawasan serta sembilan non-BUMN lainnya.

4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla

Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) proyek privatisasi semakin genjar dilaksanakan yaitu berdasar data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dirilis belum lama ini (2009), dari 14 BUMN yang tercatat di BEI, pihak asing telah menguasai saham 31%, setara dengan Rp 137 triliun. Asing menguasai sektor-sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankan, pertambangan dan migas, semen, serta farmasi. Pada beberapa BUMN kategori blue chips, kepemilikan asing bahkan menyundul angka 40 persen. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, misalnya, 39,5 persen sahamnya kini dalam genggaman pihak asing. Demikian pula PT Semen Gresik Tbk sebanyak 39,21% dikuasai asing. Bank Rakyat Indonesia (BRI)–yang selama ini menjadi andalan para petani dan rakyat kecil–sahamnya telah dikuasi asing sebesar 35,39 persen.

Salah satu langkah luar biasa pemerintah SBY-JK adalah program privatisasi 44 BUMN di tahun 2008 yang akhirnya juga kandas setelah diprotes dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh nasional. Pada 31 Januari 2008, Boediono sebagai ketua Komite Privatisasi BUMN meneken surat keputusan untuk menjual 44 BUMN milik negara Indonesia. Dari 44 BUMN itu, sebanyak 33 di antaranya adalah nama baru, sedangkan 11

lainnya adalah perusahaan yang direncanakan dilego tahun lalu, tapi belum kesampaian. Keputusan privatisasi dilakukan oleh Komite Privatisasi Perusahaan BUMN yang diketuai Menko Perekonomian Boediono, dengan Wakilnya adalah Meneg BUMN Sofyan Djalil dan anggotanya Menkeu Sri Mulyani Indrawati serta menteri yang menjadi pembina teknis BUMN yang akan dijual.

Kebijakan neoliberalisasi pada pemerintahan SBY sungguh sangat jelas kita bisa melihat daftar produk perundangan-undangan yang membela kepentingan asing. Sebut saja UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing. Dimana paket perundangan tersebut sangat berpengaruh pada setiap sektor kehidupan dimana investasi asing atau perusahaan multinational bisa menguasai semua sektor yang terbuka di Negara ini sebut saja Kepemilikan asing diperbolehkan sampai 95% di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Pembangkit Tenaga Listrik, Pekerjaan Umum, Pengusahaan untuk jalan Tol, penguasaan air minum, dan banyak lagi. Lalu UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan yang memang di batalkan namun diganti dengan PP 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang sebenarnya mempunyai esensi yang sama yaitu liberalisasi pendidikan. Tak kurang PLN dan Garuda Indonesia turut di privatisasi pada pemerintahan ini.

B. Pendidikan di Indonesia

1. Sejarah Pendidikan di Indonesia

Sebenarnya pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak lama pada zaman Hindu-Budha dengan kemunculan beberapa kerajaan di abad ke-5 saat itu yaitu Kerajaan Hindu di Kutai (Kalimantan), Kerajaan Hindu Tarumanegara (Jawa Barat) dan Kerajaaan maritime terkenal yaitu Sriwijaya. Pada masa itu, pendidikan sangat terkait dengan agama.

Pada abad ke-7 M Islam mulai masuk ke Indonesia melalui lalu lintas perdagangan laut dan lalu munculah kerajan Islam Perlak (1292) dan Kerajaan Samudra Pasai (1297). Pendidikan Islam berkembang kala itu bermula dari dakwah informal hingga menjamurlah pesantren-pesantren secara tradisional hingga pola pendidikan yang teratur dan berjenjang.

a. Masa Pemerintahan Belanda

Tepatnya pada abad 17 melalui kongsi dagang yang bernama VOC belanda masuk dan berhasil mengusir pemerintahan kolonial Portugis sebelumnya. Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan kedalam 2 (dua) periode besar, yaitu pada masa VOC (Vereenigde Oost-indische Compagnie) dan masa pemerintah Hindia Belanda (Nederlands Indie). Pada masa VOC, yang merupakan sebuah kongsi (perusahaan) dagang, kondisi pendidikan di Indonesia dapat dikatakan tidak lepas dari maksud dan kepentingan komersial. Pendidikan pada masa ini di mulai progresif sejak kebijakan politis etis pada tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di kerajaan Belanda. Van Deventer yang menjabat sebagai

Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis (Etische Politiek) pada tahun 1899 dengan motto "de Eereschuld" (hutang kehormatan) dan slogan "Educatie, Irigatie, Emigratie". Pemerintah Belanda lambat laun seolah-olah bertanggung jawab atas pendidikan anak Indonesia melalui politik etis. Akan tetapi sentiment yang berkembang pendidikan dilakukan oleh pemerintahan Kolonial Belanda saat itu adalah bertujuan untuk menproduksi tenaga siap pakai dan murah dari kaum pribumi.

Prinsip-prinsip atau arah etis (etische koers) yang diterapkan di bidang pendidikan pada masa ini adalah: (1) Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi. Bahasa Belanda diupayakan menjadi bahasa pengantar pendidikan; (2) Pendidikan rendah bagi pribumi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sistem pendidikan pada masa ini belum lepas dari pola stratifikasi sosial yang telah ada, dan beroleh pengesahan legal sejak tahun 1848 dari penguasa kolonial. Dalam stratifikasi resmi tersebut dinyatakan bahwa penduduk dibagi kedalam 4 (empat) golongan: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan yang dipersamakan dengan Eropa; (3) Golongan Bumiputera; dan (4) Golongan yang dipersamakan dengan Bumiputera. Tahun 1920, rumusan ini mengalami revisi menjadi seperti berikut ini: (1) Golongan Eropa; (2) Golongan Bumiputera; dan (3) Golongan Timur Asing. Perlu dicatat bahwa untuk golongan pribumi (bumiputera), secara sosial terstratifikasi sebagai berikut: (1) Golongan bangsawan (aristokrat) dan pemimpin adat; (2) Pemimpin agama (Ulama); dan (3) Rakyat biasa. Secara umum, sistem pendidikan di

Indonesia pada masa penjajahan Belanda sejak diterapkannya Politik Etis dapat digambarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar Bahasa Belanda (ELS, HCS, HIS), sekolah dengan pengantar bahasa daerah (IS, VS, VgS), dan sekolah peralihan. (2) Pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum (MULO, HBS, AMS) dan pendidikan kejuruan. (3) Pendidikan tinggi.[34]

Pendidikan dibuat berjenjang, tidak berlaku untuk semua kalangan, dan berdasarkan tingkat kelas. Pendidikan lebih diutamakan untuk anak-anak Belanda, sedangkan untuk anak-anak Indonesia dibuat dengan kualitas yang lebih rendah. Pendidikan bagi pribumi berfungsi untuk menyediakan tenaga kerja murah yang sangat dibutuhkan oleh penguasa. Sarana pendidikan dibuat dengan biaya yang rendah dengan pertimbangan kas yang terus habis karena berbagai masalah peperangan.

b. Masa Pemerintahan Jepang

Setelah Februari 1942 menyerang Sumatera Selatan, Jepang selanjutnya menyerang Jawa dan akhirnya memaksa Belanda menyerah pada Maret 1942. Belanda digantikan oleh kekuasaan Jepang. Jepang membawa ide kebangkitan Asia yang tidak kalah liciknya dari Belanda. Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo China dan

[34] Roshid, Rum Op.cit. hal. 8

Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negara ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut.

Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik. Jepang kemudian menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Hal-hal tersebut antara lain: (1) Dijadikannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan Bahasa Belanda; (2) Adanya integrasi sistem pendidikan.

Dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut: (1) Pendidikan Dasar (Kokumin Gakko / Sekolah Rakyat). Lama studi 6 tahun. Termasuk SR adalah Sekolah Pertama yang merupakan konversi nama dari Sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. (2) Pendidikan Lanjutan. Terdiri dari Shoto Chu Gakko (Sekolah Menengah Pertama) dengan lama studi 3 tahun dan Koto Chu Gakko (Sekolah Menengah Tinggi) juga dengan lama studi 3 tahun. (3) Pendidikan Kejuruan. Mencakup sekolah lanjutan bersifat vokasional antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. (4) Pendidikan Tinggi.[35]

[35] Op.cit. hal. 11

c. Era Awal Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan, perubahan bersifat sangat mendasar yaitu menyangkut penyesuaian bidang pendidikan. Badan pekerja KNIP mengusulkan kepada kementrian pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan supaya cepat untuk menyediakan dan mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan (Mestoko, 1985:145).

Pada bulan Desember 1949, terjadi perubahan ketatanegaraan dimana UUD 1945 diganti dengan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Meski landasan idiil (yaitu Pancasila) tidak berubah, tetapi formulasi tujuan pendidikan mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam UU No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang disahkan oleh Presiden RI (Mr. Assaat) dan Mendikjar RI (S. Mangunsarkoro), yaitu: "Membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air." Rumusan tujuan pendidikan ini kemudian dituangkan kembali dalam UU No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang sesungguhnya merupakan pemberlakuan kembali UU No. 4 tahun 1950 untuk seluruh wilayah RI.

Tujuan pendidikan nasional kembali mengalami perubahan ketika politik Negara dikendalikan faham Manipol-Usdek di bawah pimpinan Bung Karno sejak 1959. Dalam Kepres RI No. 145 tahun 1965 tentang

Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila disebutkan bahwa: "Tujuan Pendidikan Nasional kita baik yang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a) Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, (b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Kebangsaan, (d) Kerakyatan, (e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek." Formulasi ini ternyata tidak bertahan lama karena peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965 yang menyadarkan rakyat tentang motif politik PKI di balik cita-cita pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada masa Orde Baru melalui Ketetapan MPRS RI No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah: "Membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945."[36]

Pada tahun 1973, MPR hasil pemilu mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/1973 yang dikenal dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang di dalamnya menyebutkan rumusan tujuan pendidikan sebagai berikut: "Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di

[36] Op.cit. hal. 14

luar sekolah dan berlangsung seumur hidup." Tujuan ini kemudian mengalami reformulasi kembali dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 yang berbunyi: "Pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggibudi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa."[37]

d. Pada Masa Orde Baru

Namun sebaliknya, pada periode 1959-1998 muncul pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistik dan patriotik. Terlebih lagi pada masa pemerintahan Soeharto yang dianggap sebagian besar kalangan mulai mengenyampingkan isu tentang pendidikan. Pada saat itu kita lebih melihat pendidikan digunakan sebagai kendaraan politik bagi pemerintah untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat. Hal tersebut ditempuh terkait dengan kekhawatiran akan timbulnya gejolak apabila pendidikan benar-benar diperkenalkan sepenuhnya. Mereka lebih banyak berasyik-masyuk dengan kepentingan kelompok, karena bagi mereka kekuasaan bukan lagi amanah namun kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga, dan teman-

[37] Ibid.,

teman dekatnya. Sejak saat itulah pandangan terhadap dunia pendidikan dianggap tidak lagi menjanjikan segi finansial apapun, non issue, sesuatu hal yang mudah, sesuatu yang dapat ditangani siapa saja, sehingga wajar bila kemudian diketepikan dan digeser pada prioritas yang kesekian. Sistem pendidikan kita terlihat masih bersifat tambal sulam, mulai dari kebijakan kurikulum, manajemen, sistem pembelajaran, tuntutan kualitas guru, tuntutan fasilitas dan dana pendidikan, kurang memliki "prioritas" yang ingin dicapai. Sementara secara umum, pendidikan seringkali dipandang sebagai investasi modal jangka panjang yang harus mampu membekali "pembelajar" untuk menghadapi kehidupan masa depannya. Pendidikan harus mampu mencerahkan "pembelajar" dari ketidak tahuan menjadi tahu dan memberdayakan, artinya pendidikan mampu membuat "pembelajar" berhasil dalam kehidupan. Maka, berbicara soal pendidikan adalah bicara "soal kualitas kehidupan "pembelajar", soal kualitas sumberdaya manusia [SDM], yang akan menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia untuk ikutan bergulir sejajar dengan bangsa lain.

Semasa Orde Baru, dana pendidikan yang dikeluarkan tak lebih dari 8 persen dari APBN. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, dapat terlihat bahwa pemerintah Indonesia tak pernah memperhatikan pendidikan. Sejak tahun anggaran 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, Thailand masing-masing mengalokasikan 18,8 persen, 19,3 persen, 19,5 persen, 18,9 persen, dan 20,40 persen, maka untuk periode yang sama Indonesia hanya 8,08 persen,

7,69 persen, 7,1 persen, 6,73 persen, dan 6,96 persen. Untuk hal yang sama, sering disebut sebut Malaysia sudah mengalokasikan 25 persen sejak 1974.[38]

2. Pendidikan di Indonesia

Republik Indonesia disingkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau, oleh karena itu ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara). Dengan populasi sebesar 222 juta jiwa pada tahun 2006, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih langsung. Ibukota negara ialah Jakarta. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.[39]

---

[38] http://pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/03/analisa-dampak-neoliberalisme-di-dunia.html

[39] Wikipedia. *Indonesia.*

Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemdiknas), dahulu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Depdikbud). Di Indonesia semua penduduk wajib mengikuti pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan tiga tahun di sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha terencana untuk membangun lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga para anak didik dapat secara giat mengembangkan potensi masing-masing guna memperbaiki taraf kerohanian, kesadaran, kepribadian, kecerdasan, keetisan, dan kekreatifan yang sesuai bagi masing-masing, bagi sesama warga negara, maupun bagi bangsa. Konstitusi nasional juga mencantumkan bahwa pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu formal dan non-formal. Pendidikan formal dibagi lagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi.[40]

a. Visi dan Misi Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

[40] Wikipedia. *Pendidikan di Indonesia*

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

b. Jenjang pendidikan di Indonesia

TABEL 2.1

JENJANG PENDIDIKAN DI INDONESIA

Usia	Kelas	Lembaga Pendidikan
3 4 5	KB A B	Taman Kanak-kanak
6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6	Sekolah Dasar
12 13 14	7 8 9	Sekolah Menegah Pertama
15 16 17	10 11 12	Sekolah Menegah Atas/Kejuruan
18 19 20 21		Akademi/Institut/Politeknik/Sekolah tinggi/Universitas

Sumber: Wikipedia Jenjang Pendidikan di Indonesia

Jenjang pendidikan di Indonesia yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

1) Prasekolah

Dari kelahiran sampai usia 3 tahun, kanak-kanak Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal. Dari usia 3 sampai 4

atau 5 tahun, mereka memasuki taman kanak-kanak. Pendidikan ini tidak wajib bagi warga negara Indonesia, tujuan pokoknya adalah untuk mempersiapkan anak didik memasuki sekolah dasar. Dari 49.000 taman kanak-kanak yang ada di Indonesia, 99,35% diselenggarakan oleh pihak swasta[41]. Periode taman kanak-kanak biasanya dibagi ke dalam "Kelas A" (atau Nol Kecil) dan "Kelas B" (atau Nol Besar), masing-masing untuk periode satu tahun.

2) Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah yaitu warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar. Kanak-kanak berusia 6–11 tahun memasuki *sekolah dasar* (SD) atau *madrasah ibtidaiyah* (MI). Tingkatan pendidikan ini adalah wajib bagi seluruh warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi nasional. Tidak seperti taman kanak-kanak yang sebagian besar di antaranya diselenggarakan pihak swasta, justru sebagian besar sekolah dasar diselenggarakan oleh sekolah-sekolah umum yang disediakan oleh negara (disebut "sekolah dasar negeri" atau "madrasah ibtidaiyah negeri"), terhitung 93% dari seluruh sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah yang ada di

[41] Statistik Pendidikan RI 2004-2005 http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn0405/TK_0405.htm

Indonesia[42]. Sama halnya dengan sistem pendidikan di Amerika Serikat dan Australia, para siswa harus belajar selama enam tahun untuk menyelesaikan tahapan ini. Beberapa sekolah memberikan program pembelajaran yang dipercepat, di mana para siswa yang berkinerja bagus dapat menuntaskan sekolah dasar selama lima tahun saja.

3) Pendidikan Menengah Pertama

Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi persyaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) adalah bagian dari pendidikan dasar di Indonesia. Setelah tamat dari SD/MI, para siswa dapat memilih untuk memasuki SMP atau MTs selama tiga tahun pada kisaran usia 12-14. Setelah tiga tahun dan tamat, para siswa dapat meneruskan pendidikan mereka ke sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau madrasah aliyah (MA).

[42] Statistik sekolah dasar 2004-2005 -http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn04-05/SD_0405.htm

4) Sekolah Menengah Atas

Di Indonesia, pada tingkatan ini terdapat tiga jenis sekolah, yaitu sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah (MA). Siswa SMA dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, sedangkan siswa SMK dipersiapkan untuk dapat langsung memasuki dunia kerja tanpa melanjutkan ke tahapan pendidikan selanjutnya. Madrasah aliyah pada dasarnya sama dengan sekolah menengah atas, tetapi porsi kurikulum keagamaannya (dalam hal ini Islam) lebih besar dibandingkan dengan sekolah menengah atas.

Jumlah sekolah menengah atas di Indonesia sedikit lebih kecil dari 9.000 buah[43]

5) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutkan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyakarat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Setelah tamat dari sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, para siswa

[43] Statistik sekolah menengah 2004-2005 http://www.depdiknas.go.id/statistik/thn04-05/SMA_0405.htm

dapat memasuki perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Indonesia dibagi ke dalam dua kategori: yakni negeri dan swasta. Kedua-duanya dipandu oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Terdapat beberapa jenis lembaga pendidikan tinggi; misalnya universitas, sekolah tinggi, institut, akademi, dan politeknik.

Ada beberapa tingkatan gelar yang dapat diraih di pendidikan tinggi, yaitu Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3).